

MEMBANGUN RELASI HUBUNGAN PEMERINTAH - SWASTA - MASYARAKAT CIVIL DALAM PARADIGMA GOVERNANCE UNTUK KALTENG LEBIH BERKAH DAN BERMARTABAT

OLEH :

Jhon Retei Alfri Sandi

Abtrak

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan memasuki era revolusi industri 4.0 serta society 5.0 dimana peradaban masyarakat mulai berpusat kepada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang berpotensi mengurangi peran manusia, tantangan mengelola negara dan pemerintahan serta kewajiban mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi semakin berat dan menuntut kecepatan, ketepatan, pelayanan yang baik, menjunjung tinggi hak-hak individu dan kepentingan umum secara transparan, adil dan merata.

Inovasi pemerintahan dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat harus semakin dikembangkan dan ditingkatkan. Menjawab tantangan berat pengelolaan pemerintahan dimasa disrupsi, pandemic covid 19, kelesuan perekonomian dunia-nasional dan daerah, salah satu yang dapat dikembangkan adalah membangun "*Collaborative Governance*". Kolaborasi yang efektif penting diwujudkan dalam rangka pencapaian sasaran target, peningkatan hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi.

Keyword : Relasi, Globalisasi, Kolaborasi

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation- bulding*)¹. Pembangunan di suatu negara harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan baik pada semua tingkat pemerintahan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Negara diharapkan hasil-hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat lokal atau

*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

¹ Prof.Dr. Sondang P. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi. Bumi Aksara Jakarta

masyarakat setempat dimana pembangunan itu dilaksanakan. Mengingat pembangunan merupakan tumpuan aspirasi atau keinginan untuk memperbaiki nasib dari suatu bangsa².

Pembangunan di Indonesia telah memasuki hampir 8 (delapan) dasawarsa atau 75 tahun Indonesia merdeka, namun kenyataannya belum mampu membawa kesejahteraan merata dan berkeadilan, dimana masalah-masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, keterisolasian, serta ketimpangan hasil-hasil pembangunan masih dominan dihadapi. Di Kalimantan Tengah 6 (enam) dasawarsa lebih atau 64 tahun sejak berdirinya provinsi masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan-tantangan mewujudkan keadilan, pemerataan, kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah di 14 kabupaten/kota dengan luas wilayah 153.564 Km². Namun secara bertahap dan terencana serta sinergitas yang baik dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat, Kalimantan Tengah akan mampu sejajar dengan provinsi lain untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan memasuki era revolusi industry 4.0 serta society 5.0 dimana peradaban masyarakat mulai berpusat kepada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang berpotensi mengurangi peran manusia, tantangan mengelola negara dan pemerintahan serta kewajiban mensejahterakan kehidupan masyarakat menjadi semakin berat dan menuntut kecepatan, ketepatan, pelayanan yang baik, menjunjung tinggi hak-hak individu dan kepentingan umum secara transparan, adil dan merata.

Inovasi pemerintahan dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat harus semakin dikembangkan dan ditingkatkan. Para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah harus memiliki kecerdasan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 ayat (1) menyatakan :*“Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”*. Ayat (2): *“Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*.

Simpulan utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara mewujudkan kemajuan pembangunan bangsa atau daerah dan kesejahteraan masyarakat dewasa ini sebagaimana *Paradigma Governance* berfokus kepada keterlibat para aktor-aktor atau kaki-kaki pemerintahan yakni : (i) State; (ii)

² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal 678.

Private; dan (iii) Civil Society. Negara (state) tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Kenyataannya peranan sector Swasta dan masyarakat melalui Civil Society sangat signifikan mempengaruhi tugas dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dewasa ini.

Bagaimana praktek paradigma ‘governance’ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ?. Bagaimana hubungan para aktor diciptakan sehingga melahirkan sinergitas antara komponen-komponen dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih berkah dan bermartabat ?.

PEMBAHASAN

Paradigma Governance menjadi paradigma penting saat ini dan hampir semua negara menjadikan sebagai strategi baru paradigma memerintah atau mengelola negara. Konsep “governance” menggantikan konsep “government”. Governance berasal dari kata “*Govern*” yang oleh para ahli didefinisikan sebagai : “mengambil peran lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat”. Governance termasuk totalitas semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah”³.

“*Government*” mengandung makna politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara bersifat pasif. Sedangkan “*governance*” mengandung makna merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif) sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government⁴. Konsep “governance” menekankan keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah-masalah public. Praktik governance bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan public dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar⁵. Chema dan Keban (2008) governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah dan sector swasta⁶.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa ‘*governance*’ merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis, dimana “*governance*”

³ Agus Dwiyanto, 2015. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif, Yogyakarta : UGM Press hal 1.

⁴ Hetifah. Sj, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia hal 2.

⁵ ----- Agus Dwiyanto, Ibid hal 2.

⁶ Jeremias.T.Keban, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : Penerbit Gaya Media, hal 38.

membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sector lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukan hanya actor tunggal yang dominan dalam pemerintahan. Otoritas pemerintahan tunggal harus dibagi atau dikurangi dengan turutsertanya pihak *swasta* dan *civil society* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut urusan-urusan public. Ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan public mengalami permasalahan di luar kemampuannya atau mengalami keterbatasan dalam hal sumberdaya manusia dan finansial, sehingga dalam permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dapat membantu pemerintah. Enroth (2014) menyatakan : Pendekatan “*governance*” lebih menekankan pada upaya pemecahana masalah public, bukan hanya sekedar membuat kebijakan untuk masyarakat⁷.

Menurut Prof.Bintoro Tjokroamijojo (2001) tiga komponen *governance* (state-privat- civil society) ini harus berinteraksi dalam fungsinya yang paling tepat bagi masing-masing. Pemerintah lebih berperan fasilitasi (*facilitating*) dan *enabling* (yang memungkinkan masyarakat sendiri berperan aktif sebagai pelaku ekonomi sosial) dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan, pendapatan melalui produksi barang dan jasa. Kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik dan mengembangkan serta menjaga *rules of the game dan rules of ethic* yang baik dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, memberdayakan masyarakat atau dalam istilah ungkapan : *the government* menjadi *the enzyme of growth the private sector* dan organisasi masyarakat sendiri yang mampu adalah : *the engine of growth*”.⁸

Enam puluh empat tahun (64 tahun) Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk, mulai dari membangun ibukota provinsi Kalimantan Tengah yakni Kota Palangka Raya yang hutan semak belukar sehingga menjadi kota pusat kedudukan ibukota pemerintahan, merupakan sebuah perjalanan panjang para pendiri daerah untuk menjadikan Kalimantan Tengah sejajar dengan provinsi lain, mengubah kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang terisolir, terkebelakang dan tertinggal baik dari fasilitas infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, komunikasi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan lain-lain, sehingga berlahan namun pasti dapat tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang maju. Keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras dan partisipasi aktif warga masyarakat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat harus menurus dikembangkan dan ditingkatkan.

⁷ Enroth, Hendrik.2014. *Governance : The art of governing after governmentality*, European Journal of Society Theory 17 (1), pp.60-76.

⁸ Prof. Bintoro Tjokroamijojo. 2001. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. ISBN : 979-8619- 17 – X.

Terpilihnya pasangan H.Sugianto Sabran-H.Habib Ismail Bin Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 dengan Visi menjadikan **Provinsi Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, Adil untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)** merupakan fase lanjutan perjuangan perwujudan cita-cita pendirian Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diletakan para pemimpin daerah sebelumnya. Hasil Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2021-2024 tahun 2020 yang kembali memenangkan H.Sugianto Sabran dan pasangannya H.Edy Pratowo,S.Sos,MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah *menjadi jembatan emas sekaligus ruang pengujian meneguhkan perwujudan janji politik* agar **Provinsi Kalimantan Tengah Menjadi Semakin Berkah**.

Kondisi pandemic corona virus disease (Covid 19) yang masih terus berlangsung melanda Indonesia bahkan negara-negara di dunia yang membawa perlambatan Laju Pertumbuhan Domestic Regional Bruto Kalimantan Tengah pada tahun 2017 berada pada 6,73 tahun 2019 berada pada 6,12 dan pada tahun 2020 turun menjadi -1,40⁹ dan kuartal pertama tahun 2021 mengalami penurunan -3,30. Jumlah penduduk hidup dibawah garis kemiskinan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 438.428 jiwa menjadi pada 485.635 jiwa tahun 2020. Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 70,91 pada tahun 2019 menjadi 71,05 pada tahun 2020. Angka pengangguran terbuka yang meningkat dari 4,08 pada tahun 2019 menjadi 4,58 pada tahun 2020¹⁰, *menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara professional, cerdas dan inovatif*.

Kondisi *disrubs* yang menciptakan ketidakpastian dalam berbagai aspek. Kebijakan pembatasan sosial dengan penerapan prokol kesehatan (prokes) dan pembatasan interaksi langsung aktivitas masyarakat dan pemerintah, peningkatan angka pengangguran dan orang-orang yang kehilangan sumber pendapatannya serta anggaran pemerintah daerah yang tersedot pada upaya penanganan persebaran pandemic dan upaya pemulihan Kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup dan peradaban masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan dampak pandemic, *menjadi tantangan berat* pasangan H.Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo,S.Sos.,MM pada periode pemerintahannya saat ini. Dibutuhkan strategi cerdas, tepat dan inovatif serta kapasitas kepemimpinan membumi yang berakar pada persoalan masyarakat, profesionalitas aparatur dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan aspek transparansi, pemerataan, keadilan, profesionalitas, proprsionalitas, kemandirian dan akuntabilitas.

⁹ Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, bps.go.id.

¹⁰ ----- BPS Kalimantan Tengah.

Menjawab tantangan berat pengelolaan pemerintahan dimasa disrubs, pandemic covid 19, kelesuan perekonomian dunia-nasional dan daerah, salah satu yang dapat dikembangkan adalah membangun **“Collaborative Governance”**. Ansell dan Grash (2007) menyatakan : *Collaborative governance is there fore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*. Dimana konsep ini menyatakan pentingnya kondisi dimana actor public dan actor privat (swasta) bekerjasama dengan cara dan proses tertentu yang pada saatnya dapat menghasilkan produk hukum atau kebijakan pemerintah yang tepat mengatur public dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, actor public yaitu pemerintah dan actor privat yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat (*civil society*) bukanlah sesuatu yang terpisah dan bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja Bersama-sama demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar actor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara sendiri-sendiri¹¹. **Aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan lebih pada aspek formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah** atau program dari lembaga public/pemerintah. Kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan **harus menjunjung tinggi nilai “Deliberatif”** atau **“Musyawarah”** dan **“Konsensus”** antar tiap actor atau stakeholders yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seigler (2011) menyampaikan 8 (delapan) prinsip utama dalam penerapan collaborative governance yakni :

- (1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produk barang public;
- (2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan asset untuk mencegah masalah public;
- (3) Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka dengan memberdayakan masyarakat;
- (4) Kebijakan harus menghadirkan musyawarah public;
- (5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan;
- (6) Kebijakan harus strategis;
- (7) Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat dan pemecahan masalah public;
- (8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas¹².

Proses kolaborasi merupakan suatu proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan public dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batasan-batasan kelembagaan public, tingkat pemerintahan, masyarakat, swasta dan civil society untuk melaksanakan kepentingan umum yang

¹¹ Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2 007. Collaborative Govetnance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545

¹² Sigler,D.,2011. Renewing Democracy by Enggaging Citizen in Shared Governance. Public Administration Review pp.968-70.

tidak bisa dicapai tanpa pelibatan pihak swasta dan masyarakat (Emerson, Nabatchi & Balogh 2011 dalam Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh.Imbron, 2017).

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Ia tidak muncul secara mendadak namun didorong banyak pihak tentang pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam penyelesaian masalah-masalah public. Kegagalan implimentasi dan tingginya biaya serta politisasi regulasi menjadi salah satu factor pendorong, termasuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Junaidi (2015)¹³ mencatat 7 (tujuh) hal terkait factor pentingnya menuntut adanya collaborative governance yakni :

- (1) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
- (2) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam;
- (3) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik;
- (4) Kegagalan implementasi kebijakan ditataran pelaksanaan;
- (5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok untuk menghambat keputusan;
- (6) Mobilisasi kelompok kepentingan;
- (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Kolaborasi yang efektif penting diwujudkan dalam rangka pencapaian sasaran target, peningkatan hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. Johanson (2010) mengemukakan bahwa peran dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program kebijakan public akan sangat menentukan arah perubahan yang diharapkan oleh program itu sendiri. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam semua proses publiknya diharapkan mampu membawa dampak positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas¹⁴.

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya tetapi juga system kelembagaan di masyarakat¹⁵. Selanjutnya Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron (2017) menegaskan : Kunci dalam menciptakan system kelembagaan yang efektif bagi suatu program berbasis masyarakat adalah pada bagaimana mengupayakan keterlibatan masyarakat dengan segala potensinya. Oleh sebab itu pembangunan kelembagaan yang berbasis pada masyarakat merupakan bagian dari upaya rekayasa sosial di masyarakat¹⁶.

¹³ Junaidi, 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. FISIP Umrah hal.10.

¹⁴ Johanson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan Erik Nylund, Reidar Persson, 2010. Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, *Voluntas*, 21, pp.371-92.

¹⁵ Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7 hal 2.

¹⁶ ----- Ibid hal 2.

Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron (2017) dalam penelitian tentang Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas menyimpulkan : Dengan multistakeholders, implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Jejaring tersebut mampu menjadi kuat apabila arus informasi, keterbukaan dan kesepahaman mampu diraih oleh masing-masing actor tanpa kecuali. Kondisi tersebut dapat tercapai melalui model penguatan kelembagaan yang berbasis pada collaborative governance. Model penguatan kelembagaan collaborative memiliki peranan penting dalam membangun keterlibatan masyarakat. Model ini mampu memperkuat system jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidaksepahaman antara stakeholders. Model ini juga dapat memperjelas peran masing-masing stakeholders serta akuntabilitasnya. Hasil penelitian juga menjelaskan peran bahwa collaborative governance masing-masing stakeholders memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen public¹⁷.

Mewujudkan Kalimantan Tengah lebih BERKAH dan Pemanjatan Inovasi Aksi Instansi Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana tema kegiatan ini, menuntut pengembangan kapasitas dalam penyesuaian tatakelola pemerintahan berbasis pelibatan peran para actor dalam konstruksi collaborative governance. Sepanjang kapasitas dimensi-dimensi collaborative governance tidak dapat diwujudkan dengan baik berdasarkan tatakelola paradigma governance, maka akan berada pada tataran retorika visi dan misi.

PENUTUP

Tatakelola pemerintahan yang berbasis pada pengembangan paradigma governance menjadi keharusan manajemen pemerintahan moder dewasa ini. Collaboratif governance menjadi salah satu kunci mewujudkan janji-janji politik pemimpin daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerahnya.

DAFTAR BACAAN

Agus Dwiyanto, 2015. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kalaboratif, Yogyakarta : UGM Press.

¹⁷ Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Jurnal Sosiohumaniora, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7 hal 5-6.

Denok Kurniasih, Paulus Israwan dan Moh Imron. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volumen 19 No.1 Maret 2017 : 1-7.

Enroth, Hendrik.2014. Governance : The art of governing after governmentality, *European Journal of Society Theory* 17 (1), pp.60-76.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hetifah. Sj, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Johanson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan Erik Nylund, Reidar Persson, 2010. Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, *Voluntas*, 21

Jeremias.T.Keban, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.

Prof.Dr. Sondang P. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi. Bumi Aksara Jakarta

·
·
Sigler,D.,2011. Renewing Democracy by Enggaging Citizen in Shared Governance. *Public Administration Review* pp.968-70.

Junaidi, 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. *FISIP Umrah*.